

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur pokok bagi kemajuan suatu bangsa. Artinya, kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam membangun pembangunan nasional seperti pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur (Iryani & Ramdani 2019). Pembangunan manusia adalah salah satu indikator krusial untuk menilai kemajuan suatu wilayah. Keberhasilan dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas manusia di daerah tersebut. Untuk menilai sejauh mana pencapaian pembangunan manusia, *United Nations Development Programme* telah memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang mencerminkan aspek pembangunan dari perspektif manusia. Secara konseptual, pembangunan manusia dipromosikan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) dengan pendekatan yang lebih mendesak dalam menilai ukuran yang ingin dicapai. Di Indonesia, perhitungan IPM dimulai pada tahun 1996 dan dilakukan secara rutin setiap tiga tahun di tingkat nasional dan provinsi. Pada tahun 1999, Indonesia mulai menghitung IPM pada tingkat yang lebih rinci, yaitu Kabupaten/Kota. Pada tahun 2014, metode perhitungan IPM di Indonesia diperbarui oleh UNDP sejak tahun 2010 dan untuk memastikan ketersediaan data dari tahun-tahun

sebelumnya, dilakukan backcasting untuk periode data 2010-2013 (Efendi *et al.*, 2024).

Pengukuran kualitas pembangunan manusia dapat dilihat melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat tiga komponen utama yang mempengaruhi nilai IPM, yaitu tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, dan standar hidup yang layak. Jika suatu kabupaten/kota memiliki angka IPM yang mendekati 100, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusianya baik. Sebaliknya, jika suatu wilayah memiliki angka IPM yang mendekati atau sama dengan nol, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan di wilayah tersebut buruk. Kategori nilai IPM ini dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pencapaian Nilai IPM

Nilai Indeks Pembangunan Manusia	Status Pembangunan Manusia
IPM > 80	Tinggi
IPM 69-70	Menengah Atas
IPM 50-69	Menengah Bawah
IPM < 50	Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami peningkatan signifikan setelah pandemi *COVID-19*, mencapai rekor tertinggi sebesar 0,71 pada tahun 2022. Meskipun demikian, skor ini masih belum mencolok dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN dan tetap di bawah rata-rata global. Jika dibandingkan dengan Negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, skor Indonesia masih lebih rendah. Pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-112 dari 193 negara.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia di Negara ASEAN tahun 2022

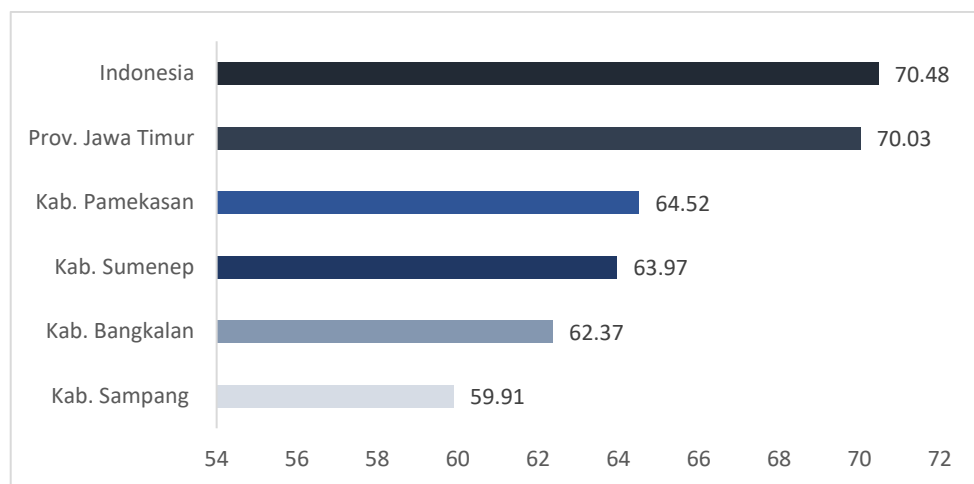
No	Negara	IPM
1	Singapura	0.95
2	Brunei Darussalam	0.82
3	Malaysia	0.81
4	Thailand	0.8
5	Vietnam	0.73
6	Indonesia	0.71
7	Philiphina	0.71
8	Laos	0.62
9	Myanmar	0.61
10	Kamboja	0.6
11	Timor Leste	0.57

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2022), diolah

Masuk dalam kelompok negara dengan status pembangunan tinggi adalah tonggak bersejarah bagi Indonesia. IPM Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2010-2024. Disisi lain distribusi peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia belum merata. Meskipun secara keseluruhan IPM Indonesia meningkat, terdapat perbedaan mencolok antara provinsi-provinsi di wilayah barat dan timur. Misalnya, DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki IPM yang sangat tinggi, sementara provinsi seperti Papua masih menghadapi tantangan besar dalam hal pembangunan manusia.

Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010-2024 memiliki nilai IPM yang fluktuasi. Pada tahun 2010 - 2024 capaian IPM sebesar 70.03 dan masuk dalam kategori tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan Provinsi Pulau jawa lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta serta Banten maka IPM Jawa Timur berada diposisi paling rendah. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk di Jawa Timur yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMP, sementara program pendidikan dari pemerintah mencakup waktu hingga sembilan tahun atau

hingga lulus dari SMK atau SMA (Novita *et al.*, 2021). Selain itu, masih tingginya jumlah pengangguran yang mengakibatkan tingginya jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten Provinsi Jawa Timur. Padahal salah satu pilar utama kekuatan ekonomi Indonesia adalah Jawa Timur, yang menyumbang hampir 15% terhadap PDRB nasional setelah DKI Jakarta.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah

Gambar 1.1 Rata Rata IPM Empat Kabupaten Pulau Madura

Pada Gambar 1.1 Jawa Timur secara administratif terdiri dari 38 kabupaten/kota, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, yang terbagi di dua pulau, 34 kabupaten/kota berada di Pulau Jawa dan 4 kabupaten di Pulau Madura. Berdasarkan evaluasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 38 kabupaten/kota antara tahun 2010 hingga 2024, terlihat bahwa keempat kabupaten di Pulau Madura memiliki nilai IPM yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur belum berjalan dengan optimal seperti yang diharapkan.

Pulau Madura Merupakan Pulau yang terdiri dari Empat Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten Pamekasan memiliki IPM tertinggi di antara empat kabupaten di Pulau Madura, yaitu sebesar 64,52 berdasarkan data Tabel 1.3. Kabupaten sumenep berada di urutan kedua dengan nilai IPM sebesar 63,97 sedangkan Kabupaten Bangkalan berada di urutan ketiga dengan nilai IPM sebesar 62,37. Di urutan terakhir dipegang oleh Kabupaten Sampang dengan nilai IPM sebesar 59.91. Nilai IPM di Empat Kabupaten hampir mirip dengan nilai IPM Provinsi Papua Barat yakni 63,68. Sementara Jawa Timur yang menaungi Empat Kabupaten Pulau Madura sudah melesat ke angka 70,03. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan dalam pembangunan manusia di Pulau Madura.

Ukuran kesejahteraan manusia dapat dilihat dari beberapa aspek misalnya tingkat partisipasi angkatan kerja, ekonomi melalui PDRB per kapita, dan masalah yang timbul dari dampak perekonomian yaitu kemiskinan. Secara tidak langsung, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki keterkaitan yang signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena menunjukkan sejauh mana penduduk usia produktif terlibat dalam aktivitas ekonomi. Ketika TPAK meningkat, maka peluang masyarakat untuk memperoleh penghasilan juga semakin besar, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan secara lebih optimal, yang merupakan dua indikator penting dalam IPM. Penelitian yang dilakukan oleh Gani *et al.*, (2023) di Gorontalo menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih baik mampu meningkatkan IPM dari kategori

menengah bawah ke menengah atas. Peningkatan ini sejalan dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi, mencerminkan hubungan positif antara kualitas tingkat partisipasi angkatan kerja dan IPM.

Tabel 1.3 Kabupaten dengan rata-rata TPAK di Jawa Timur Tahun 2010-2024

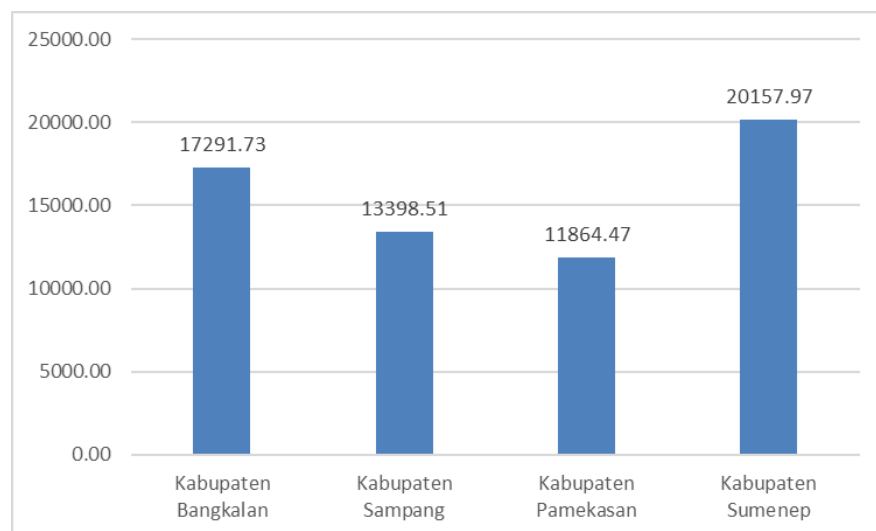
No	Kabupaten	Rata Rata (%)
1	Kabupaten Bangkalan	69.09
2	Kabupaten Sampang	71.87
3	Kabupaten Pamekasan	73.37
4	Kabupaten Sumenep	75.15

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2024).

Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 4 kabupaten Pulau Madura selama 2010-2024 cukup tinggi, dengan Sumenep tertinggi sebesar 75,15%, diikuti Pamekasan 73,37%, Sampang 71,87%, dan Bangkalan 69,09%. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk usia kerja di Madura aktif bekerja atau mencari pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal. TPAK mencerminkan seberapa besar potensi tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa TPAK memiliki hubungan positif dengan IPM, karena semakin banyak penduduk yang bekerja, semakin besar pula pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar.

Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saling terkait. PDRB per kapita yang tinggi mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, yang biasanya diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketika PDRB per kapita meningkat, pendapatan

masyarakat cenderung meningkat, memberikan mereka akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar dan Prabowo (2023) menunjukkan bahwa daerah dengan PDRB per kapita yang lebih tinggi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, sehingga berkontribusi pada peningkatan IPM secara keseluruhan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2024), diolah

Gambar 1.2 Rata-rata PDRB Perkapita harga Konstan tahun 2010-2024

Kabupaten Sumenep adalah kabupaten dengan PDRB per kapita tertinggi, mencapai 20157.97 ribu rupiah, PDRB Perkapita Kabupaten Sumenep lebih tinggi daripada di daerah lainnya dalam kurun waktu 15 tahun terakhir menurut gambar 1.2. Di urutan kedua, Kabupaten Bangkalan memiliki PDRB per kapita sebesar 17291.73 ribu rupiah, diikuti oleh Kabupaten Sampang dengan 13398.51 ribu rupiah, dan yang terendah adalah Kabupaten Pamekasan dengan PDRB per kapita 11864.47 ribu rupiah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Williyan and Hasmarini (2024), Imelda *et al.*, (2021), dan Rinawati *et al.*, (2022) menyatakan bahwa PDRB

Perkapita berpengaruh signifikan terhadap IPM. Namun pendapatan perkapita tidak selalu memiliki hubungan yang positif. Pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan memiliki keterbatasan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Poernomosidi Hadjisarosa yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita tidak dapat dijadikan tolok ukur yang akurat untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu wilayah.

Tabel 1.4 Rata-rata presentase penduduk miskin di 4 Kabupaten Pulau Madura tahun 2010 – 2024

No	Kab/Kota	rata-rata
1	Bangkalan	21.87
2	Sampang	24.64
3	Pamekasan	16.73
4	Sumenep	20.46

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2024), diolah

Pada tabel 1.4 memperlihatkan bahwa selama periode tahun 2010 hingga 2024, Kabupaten Sampang memiliki rata-rata presentase penduduk miskin tertinggi di antara empat kabupaten di Pulau Madura, yaitu sebesar 24.64%. Sementara itu, Kabupaten Pamekasan memiliki rata-rata presentase penduduk miskin terendah, yaitu sebesar 16.73%. Kabupaten Bangkalan dan Sumenep memiliki rata-rata presentase penduduk miskin di antara keduanya.

Kemiskinan dapat mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tidak optimal, padahal sasaran utama pembangunan adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Jika jumlah penduduk miskin di suatu wilayah masih tinggi, hal ini akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan ekonomi. Rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan daya beli menurun, sementara kebutuhan dasar

seperti pendidikan dan kesehatan yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pun sulit terpenuhi (Sitompul *et al.*, 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas membuat peneliti tertarik untuk mengidentifikasi dan menguji faktor faktor yang berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Empat Kabupaten Pulau Madura seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dengan menyumbangkan pemikiran untuk pembaruan penelitian yang terus berkembang serta memberikan kontribusi ilmiah dalam ilmu ekonomi pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Empat Kabupaten Pulau Madura tahun 2010-2024 ?
2. Apakah PDRB Perkapita berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Empat Kabupaten Pulau Madura tahun 2010-2024 ?
3. Apakah Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Empat Kabupaten Pulau Madura tahun 2010-2024?
4. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, PDRB Perkapita, dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Empat Kabupaten Pulau Madura tahun 2010-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin di capai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Empat Kabupaten Pulau Madura tahun 2010-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Empat Kabupaten Pulau Madura tahun 2010-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Empat Kabupaten Pulau Madura tahun 2010-2024
4. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, PDRB Perkapita, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Empat Kabupaten Pulau Madura tahun 2010-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjadi hal penting karena penelitian tersebut terbukti dapat diaplikasikan dan diimplementasikan. Berdasarkan pemaparan tujuan penelitian di atas, dapat disusun beberapa manfaat penelitian yang dapat diimplementasikan sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian yang disampaikan oleh peneliti adalah sebagai sumber pengetahuan yang memungkinkan wawasan ilmiah yang terkandung dalam penelitian ini dapat diterapkan dan dipraktikkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur,

khususnya di Pulau Madura. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai perbandingan kondisi IPM di seluruh Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi penulis atau peneliti

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam dalam bidang Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita, dan kemiskinan yang berkaitan dengan aspek ekonomi di kawasan Pulau Madura selama periode 2010-2024.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi harapan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti penelitian yang serupa, yakni pada bidang indeks pembangunan manusia beserta indikator lainnya. Dalam penelitian yang peneliti paparkan juga diharapkan menjadi wawasan edukasi dan pengetahuan mengenai gambaran tentang IPM di wilayah Pulau Madura periode 2010-2024.

c. Bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten/Kota Jawa Timur

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat bantu analisis terkait tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita, dan kemiskinan, yang merupakan indikator penting dalam pembangunan manusia yang dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia. Pemerintah sebagai pengatur diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan

masuk untuk pembangunan lainnya, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di Pulau Madura.

d. Bagi mahasiswa dan lingkungan akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk wadah penunjang dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama perkuliahan. Para akademisi juga diharapkan penelitian ini menjadi bahan evaluasi dimana perlu dikaji kembali mengenai pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB Perkapita, dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia.